

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Anand, Ghansam, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Arliman, Laurensius, 2015, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.

Azis, Musdalifah, Sri Mintarti dan Maryam Nadir, 2015, *Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham*, Deepublish, Yogyakarta.

Diantha, Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.

Erawati, Elly dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Gramedia, Jakarta.

Fuady, Munir, 2017, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditsya Bakti, Jakarta.

-----, 2015, *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.

-----, 1996, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gani, Evy Savitri, 2019, *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.

Harahap, Yahya, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

Hukumonline, 2009 *Tanya Jawab Seputar Hukum Perusahaan*, Visimedia, Jakarta.

Kairupan, David, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Prenamadia Kencana, Jakarta.

Mahmud Marzuki, Peter, 2009, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.

Marilang, 2017, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Indonesia Prime, Makassar.

Moechtar, Oemar, 2017, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya.

Mulyana, Asep, 2018, *Pendekatan Ekonomi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT Grasindo, Jakarta.

Purba, Orinton, 2011, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Bogor.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sjawie, Hasbullah, 2017, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Sukandar, Dadang, 2017, *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*, Visimedia, Jakarta.

Supramono, Gatot, 2007, *Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Yudha Hernoko, Agus, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.

Wilamarta, Misahardi, 2007, *Doktrin-doktrin Fiduciary Duties and Business Judgement Rule dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*, Center for Education and Legal Studies, Depok.

Widjaja, Gunawan. 2008, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris PT: Piercing the Corporate Veil*, Forum Sahabat, Jakarta.

## **B. Jurnal**

Mezak, Meray Hendrik, “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, *Law Review* Vol. V No.3 (Maret 2006).

Pertiwi, Endah, “Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Pihak”, *Jurnal IUS* Vol VI No.2 (Agustus 2018).

Purwijanti, Kusri dan Iman Prihandono, “Pengaturan Karakteristik Beneficial Owner di Indonesia”, *Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 1 (Juni 2018).

Publish What You Pay Indonesia, “Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia: Menutup Celah (Korupsi) untuk Perbaikan Tata Kelola”, *Policy Brief* (Juli 2018).

## **C. Internet**

Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Daftar Negatif Investasi di Indonesia*, <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/daftar->

negatif-investasi-di-indonesia diakses tanggal 9 Oktober 2019 pukul 19:53 WIB.

Corruption Watch, *G20 Dragging Feet Beneficial Ownership*, <https://www.corruptionwatch.org.za/g20-dragging-feet-beneficial-ownership/> diakses tanggal 9 Okt 2019 pukul 06:55 WIB.

Darussalam, *Beneficial Owner dalam Konteks Perpres No. 13/2018 dan Pajak*, [https://news.ddtc.co.id/beneficial-owner-dalam-konteks-perpres-no-13-2018-dan-pajak-12661?page\\_y=13019.6708984375](https://news.ddtc.co.id/beneficial-owner-dalam-konteks-perpres-no-13-2018-dan-pajak-12661?page_y=13019.6708984375) diakses tanggal 25 November 2019 pukul 13:32 WIB.

Kliklegal, *PWYP Apresiasi Terbitnya Perpres Beneficial Ownership*, <https://kliklegal.com/pwyp-apresiasi-terbitnya-perpres-beneficial-ownership/> diakses tanggal 25 November 2019 pukul 11:00 WIB.

Kurnia, Abi Jam'an, *Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c888e4b16765/prinsip-mengenal-pemilik-manfaat-dari-perseroan-terbatas> diakses tanggal 5 November 2019 pukul 20:40 WIB.

Putra, Nanda Narendra, *BKPM Ubah Proses Izin Prinsip Pendaftaran Investasi*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4b421a790d5/mulai-2018--bkpm-ubah-proses-izin-prinsip-pendaftaran-investasi/> diakses tanggal 10 Oktober 2019 pukul 07:04 WIB.

Tobing, Letezia, *Koperasi sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt560d81ef5532b/koperasi-sebagai-pemegang-saham-perseroan-terbatas/> diakses tanggal 19 Oktober 2019 pada pukul 15:47 WIB.

#### **D. Peraturan perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Perkumpulan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran

Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.